

PROFIL DPPKB KABUPATEN BOVEN DIGOEL



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya Buku Profil Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Boven Digoel telah dapat diterbitkan. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melaporkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan BANGGA KENCANA, termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan KB Kabupaten Boven Digoel adalah Profil Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Boven Digoel.

Data yang digunakan dalam proses penyusunan Profil ini bersumber dari berbagai unit kerja baik lintas program dilingkungan DPPKB maupun lintas sektor dengan didukung data dari UPTD Kesehatan (puskesmas) yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran data sehingga keluaran data tersebut menjadi valid, akurat dan relevan.

Selanjutnya diharapkan saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak khususnya dalam upaya mendapatkan data/informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Profil Dinas pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019, kami sampaikan terima kasih.

Boven Digoel, 24 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB**

dr.VIVIANA M.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19640917 1995 03 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Tujuan	5
1.2 Manfaat	6
BAB II SITUASI PELAYANAN BANGGA KENCANA DPPKB KABUPATEN BOVEN DIGOEL	9
2.1 Tugas,fungsi & struktur Dinas Pengendalian Penduduk & KB	9
2.2 Sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk & KB	25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & KB	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & KB	34
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH	37
3.1 Visi	37
3.2 Misi	38
3.3 Keadaan Umum	38
BAB IV SITUASI UPAYA BANGGA KENCANA	46
4.1 Upaya dan Kegiatan Strategis program Bangga Kencana	49
BAB V PENUTUP	64

BAB I PENDAHULUAN

Program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA) saat ini tengah semarak berkiprah di tengah masyarakat . Berbagai program didisain untuk sepenuhnya berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat indonesia dan khususnya masyarakat Papua (Orang Asli Papua). Melalui pengarusutamaan program BANGGA KENCANA , kementerian / lembaga pemerintah Daerah, masyarakat dan bahkan dunia internasional sedang melirik kemajuan dan turut andil dalam membangun program BANGGA KENCANA, semangat untuk menghadirkan negara dalam urusan yang melibatkan hajat hidup orang banyak , mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan membangun dari pinggiran serta menghijrahkan mental bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik merupakan bagian dari nawa cita yang ingin diwujudkan melalui pembangunan program BANGGA KENCANA.

Dengan mengusung, mencanangkan dan membangun kampung KB, diharapkan masyarakat menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat hasil pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan inti dari kegiatan terobosan kampung KB . Masyarakat dengan kapasitasnya di buat mampu untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan isu kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Keluarga Indonesia mengadopsi pola pendekatan keluarga sesuai dengan siklus kehidupan yang secara ekonomi dapat berdikari, merencanakan kehidupan berkeluarga yang sehat dan mandiri serta keluarga yang turut membangun untuk lingkungannya, bangsa dan negaranya. Dengan semangat dan arah pembangunan yang telah di tetapkan, tidak dapat ditampikkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program BANGGA KENCANA. Esensi program

BANGGA KENCANA belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat termasuk para pimpinan daerah yang lebih menyukai dan fokus pada pembangunan infrastruktur/fisik. Program BANGGA KENCANA di anggap sebagai program dengan nilai investasi yang membutuhkan waktu lama untuk membawa hasil . pemahaman ini mendasari minimnya komitmen hampir seluruh pemerintah daerah untuk serius membangun program BANGGA KENCANA dan masyarakat lebih menerima pimpinan yang memberikan akses jalan dan rumah daripada mengajak mereka untuk membangun ketahanan keluarganya . pembangunan infrastruktur pasti dibutuhkan selama masih ada penduduk yang mendiami suatu daerah namun tidak menjadi tujuan akhir dari cita-cita pembangunan. Pembangunan fisik dibutuhkan ketika konsep pembangunan program BANGGA KENCANA dengan blue printnya secara komprehensif telah di rancang. Pembangunan fisik bertujuan untuk memberikan akses terjadinya pembangunan manusia yang lebih fundamental sebagai tujuan akhir.

Selaras dengan upaya membumikan program BANGGA KENCANA di lini terbawah , pemerintah telah melakukan sejumlah terobosan . Terobosan yang cukup menggembirakan adalah memastikan biaya operasional melalui transfer dana ke daerah yang di mulai dari tahun 2016 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat secara signifikan di tingkatkan pada tahun anggaran 2019. Menu yang disediakan untuk pemanfaatan bantuan operasional sub bidang KB atau yang di kenal dengan biaya operasional KB (BOKB) juga bertambah dan beragam. Sebelumnya BOKB mendanai sejumlah kegiatan di balai penyuluhan, distribusi alat dan obat kontrasepsi serta integrasi kampung KB. Pada tahun 2019 menu BOKB bertambah dua, yaitu mendanai kegiatan pembinaan bagi para kader (PPKBD dan sub PPKBD) serta biaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta manajemen pengelolaan BOKB di daerah. Gambaran / penjabaran singkat yang telah dijabarkan diatas merupakan situasi tentang program BANGGA KENCANA secara nasional dan juga kabupaten / kota.

Salah satu tujuan program Kependudukan, KB dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA) menuju keluarga sejahtera tahun 2017 adalah menguatkan akses pelayanan KB yang merata, berkualitas dengan pola pendekatan kesehatan reproduksi dan pengaturan jarak kelahiran melalui program 1000 hari pertama kehidupan.

Kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU no.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU no 25 tahun 1999 tentang keuangan daerah , serta peraturan pemerintah no 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi, maka kewenangan pelaksanaan pengembangan sebagian besar telah di limpahkan ke propinsi dan kabupaten / kota. Kewenangan tersebut meliputi kebijakan serta perencanaan , penggerakan , pelaksanaan dan evaluasi.

Dalam usahanya mewujudkan program BANGGA KENCANA yang berkesinambungan , dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap program BANGGA KENCANA di daerah, di tuntut untuk dapat bekerja secara profesional.

Program BANGGA KENCANA didalam RKP tahun 2017 berada pada lingkup Prioritas Nasional Pembangunan kesehatan, sehingga Badan kependudukan dan keluarga berencana memiliki kontribusi pada pembangunan kesehatan melalui Tugas utama nya lima kegiatan prioritas yaitu : 1. pelayanan keluarga berencana, 2. advokasi dan KIE BANGGA KENCANA 3. pembinaan remaja 4. pembangunan keluarga 5. Regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi . sehingga dari tugas ini diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat secara paripurna

Profil DPPKB merupakan salah satu produk dari Sistem Informasi Kesehatan yang penyusunan dan penyajiannya dibuat sesederhana mungkin tetapi informatif, untuk dipakai sebagai alat tolok ukur kemajuan program BANGGA KENCANA sekaligus juga sebagai bahan evaluasi program-program keluarga berencana. Profil DPPKB Kabupaten Boven Digoel adalah gambaran situasi pelayanan BANGGA KENCANA yang memuat berbagai data tentang situasi dan hasil pelayanan kesejahteraan keluarga selama satu tahun yang memuat data pelayanan KB, sumber daya pelayanan KB , dan capaian indikator hasil pelayanan KB.

Guna mendukung program pembangunan kependudukan KB dan keluarga (BANGGA KENCANA) di daerah Kabupaten Boven Digoel sesuai asas otonomi daerah , maka Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tuntut untuk mampu meningkatkan Program BANGGA KENCANA semaksimal mungkin.

1.1 Tujuan

a. Umum

Profil pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Boven Digoel ini bertujuan untuk memberikan gambaran Pelayanan program BANGGA KENCANA yang menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen secara berhasil guna dan berdaya guna.

b. Khusus

- a. Diperolehnya data dan informasi pembangunan di lingkungan kabupaten Boven Digoel yang meliputi : data lingkungan fisik / biologi, perilaku kesehatan masyarakat, pelayanan BANGGA KENCANA, data demografi dan social ekonomi.
- b. Diperolehnya data dan informasi tentang upaya BANGGA KENCANA di kabupaten Boven Digoel yang meliputi : cakupan kegiatan dan sumber daya pelayanan keluarga berencana.

- c. Diperolehnya data dan informasi status pelayanan BANGGA KENCANA di masyarakat kabupaten Boven Digoel yang meliputi : kesejahteraan keluarga, pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- d. Tersedianya wadah integrasi berbagai data yang telah dikumpulkan oleh berbagai sistem pencatatan dan pelaporan yang ada di mitra pelayanan spt Rumah Sakit, klinik praktek dokter, bidan , puskesmas maupun pelayanan kesehatanlainnya.

1.2 Manfaat

Dengan disusunnya profil dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) kabupaten Boven Digoel diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan administrasi pelayanan keluarga berencana dan unit-unit lain yang memerlukan. Penggunaan profil ini terutama dalam rangka tinjauan / revisi tahunan, kondisi pelayanan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA) di masyarakat di kabupaten Boven Digoel dan sebagai alat evaluasi program tahunan yang telah dilaksanakan, untuk menyusun rencana tahunan DPPKB tahun berikutnya.

Manfaat lain adalah memberikan umpan balik / gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PLKB, sub PPKBD dan para kader KB di kampung KB dan mitra kerja yang ada di Kabupaten Boven Digoel

BAB II

SITUASI PELAYANAN BANGGA KENCANA

DPPKB KABUPATEN BOVEN DIGOEL



2.1 Tugas,Fungsi & Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 1 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja DPPKB Kabupaten Boven Digoel, struktur DPPKB Kabupaten Boven Digoel terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang 7 (tujuh) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

a. Pimpinan : Kepala Dinas DPPKB

b. Pembantu : Sekretariat, membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :

- 1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.

c. Pelaksana : Bidang – Bidang

1. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- 1) Seksi Advokasi dan Pergerakan;
- 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PPLKB dan Kader KB
- 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas penyiapan, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk.

2. Bidang Keluarga Berencana membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Jaminan Pelayanan KB dan distribusi Alkon ;
- 2) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana .

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana.

3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lansia.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan, pembantu, Pelaksana dan UPTD adalah sebagai berikut :

Dinas Pengendalian penduduk dan KB memiliki Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana;
- b) Pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- c) Pembinaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana;
- d) Pengkoordinasian perencanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok setiap jabatan sebagai berikut :

a. Pimpinan : Kepala Dinas

• Tugas Pokok

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan KB.

• Fungsi

- a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Pembantu : Sekretaris

• Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

• Fungsi

- a) merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- b) merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;
- c) merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

d) merumuskan pengkoordinasiaan pembuatan Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;

e) merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset dinas;

f) merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas Dinas;mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

g) pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

h) pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

b.1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

- Tugas Pokok**

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;

- Fungsi**

a) menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, programkerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

b) mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;

- c) melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP serta penyiapan bahan bahan LPPD Dinas;
- d) mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e) melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- f) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- g) melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- h) merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- i) melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- j) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- k) mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- l) melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- m) melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- n) melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- o) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- p) melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Tugas Pokok**

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian dinas.

- Fungsi**

- a) menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;
- b) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- c) melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d) melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
- e) melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- f) melaksanakan, penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g) melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
- h) melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- i) melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- k) melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- l) menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;

- m) melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;
- n) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- o) menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dinas;
- p) menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai,karis/karsu, taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- q) menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- r) fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- s) menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cuti pegawai;
- t) pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janji pegawai;
- u) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- v) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- w) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

• **Tugas Pokok**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.

- **Fungsi**

- a) Penyusunan rencana kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
- b) penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan;
- c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakkan;
- d) Penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakkan;
- e) Penyiapan pelaksanaan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- f) Penyiapan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
- g) Penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h) Penyiapan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan KB (PKB/PLKB)
- i) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakkan;
- j) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakkan;
- k) Penyiapan pelaksanaan kordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

c.1. Seksi Advokasi dan Pergerakan

- **Tugas Pokok**

Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program advokasi dan

pergerakkan, menyiapkan bahan pembinaan ,pembibingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakkan serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi advokasi dan pergerakkan;
- b) Mengkordinasikan pelaksanaan Advokasi bidang pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;
- c) Menyusun bahan advokasi pengendalian penduduk dan KB;
- d) Melaksanakan advokasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk dan KB;
- f) Merencanakan sarana dan prasarana informasi dan edukasi pengendalian Penduduk;
- g) Menyusun materi/bahan pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan local; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c.2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

- **Tugas Pokok**

Kepala Seksi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan ,pembibingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB
- b) Menyusun Konsep pendayagunaan tenaga penyuluhan kb/petugas lapangan KB;

- c) Menyusun bahan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluhan KB /petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- d) Melaksanakan pembinaan tenaga PKB/PLKB dalam rangka pendayagunaan PKB/PLKB;
- e) Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan serta monitoring dan evaluasi tenaga Lini Lapangan;
- f) Memberikan fasilitasi dibidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi;
- g) Mengevaluasi hasil bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi;
- h) Penyusunan Instrumen pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKB/PLKB;
- i) Menyusun bahan pelaksanaan penyuluhan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya local.
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c.3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

- **Tugas Pokok**

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- b) Menyusun bahan layanan data dan informasi perkiraan pengendalian penduduk;
- c) Melaksanakan Pengolahan, Analisis data kependudukan dan keluarga berencana;
- d) Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;

- e) Menganalisis dan mengkaji proyeksi perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- f) Menyusun profil pengendalian penduduk;
- g) Melakukan analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan daerah;
- h) Menyusun bahan penetapan sasaran pengendalian penduduk;
- i) Menyusun bahan dan melaksanakan sosialisasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
- j) Menyusun bahan monitoring dan evaluasi perkembangan peta perkiraan pengendalian penduduk;
- k) Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.

D. Bidang Keluarga Berencana

- **Tugas Pokok**

Kepala Bidang Keluarga Berencana, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana.

- **Fungsi**

- a) Penyusunan rencana kegiatan bidang keluarga berencana;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana;
- c) Penyiapan pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- d) Penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
- e) Penyiapan pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- f) Penyiapan pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
- g) Penyiapan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten ;
- h) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana;

- i) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana;
- j) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

d.1. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat Kontrasepsi

- **Tugas Pokok**

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat Kontrasepsi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB dan distribusi alat kontrasepsi, serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

- a) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi jaminan pelayanan KB dan Distribusi alat kontrasepsi;
- b) Menyiapkan bahan kordinasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alkon;
- c) Melaksanakan kegiatan layanan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alkon serta pelayanan KB;
- d) Menyusun bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelayanan KB;
- e) Melaksanakan kerja sama dengan mitra kerja dalam pelayanan KB;
- f) Pemenuhan alat ktrasepsi bagi peserta KB baru dan peserta KB aktif ;
- g) Mengkordinasikan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber - KB;
- h) Penggerakan Pelayanan MKJP;
- i) Meningkatkan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi;
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

d.2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan KB

- Tugas Pokok**

Kepala Pembinaan dan Peningkatan kesertaan KB, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan KB, serta membuat laporan pelaksanaan tugas;

- Fungsi**

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pembinaan dan peningkatan Kesertaan ber KB;
- b) Menyusun bahan kordinasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB;
- c) Menyusun konsep kemitraan dibidang pembinaan kesertaan ber - KB;
- d) Meningkatkan jejaringan kerjasama dengan mitra kerja dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB;
- e) Melaksanakan Penggerakan mitra kerja dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Tugas Pokok**

Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;

- Fungsi**

- a) Penyusunan rencana kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c) Penyiapan pelaksanaan Norma, standar, Prosedur dan Kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- d) Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan keluarga
- e) Penyiapan pelakanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro;
- f) Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- h) Penyiapan pelaksanaan kordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e.1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

- **Tugas Pokok**

Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program, menyiapkan bahan pembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera, serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b) Menyusun bahan kordinasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- c) Menyusun konsep kemitraan dalam pemberdayaan keluarga sejahtera;
- d) Penyusunan program pengembangan kelompok usaha ekonomi keluarga;
- e) Menyusun bahan pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga;
- f) Menyusun bahan pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga ;
- g) Melaksanakan evaluasi program kelompok usaha ekonomi keluarga ;
- h) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan program pemberdayaan keluarga sejahtera;

- i) Meningkatkan jejaring kerja sama dengan mitra kerja dalam pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera ;
- j) Melaksanakan penggerakkan mitra kerja dalam pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera .
- k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

e.2. Seksi Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja, dan Lansia

- **Tugas Pokok**

Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja, dan Lansia, serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi bina ketahanan keluarga balita,anak, remaja dan lansia;
- b) Menyusun dan mengembangkan Pembangunan Keluarga melalui bina keluarga balita dan anak;
- c) Menyusun program pembinaan keluarga lansia;
- d) Melaksanakan pengembangan kelompok bina ketahanan remaja jalur pendidikan;
- e) Melaksanakan pengembangan kelompok bina ketahanan remaja jalur masyarakat;
- f) Menyusun bahan kordinasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga melalui bina ketahanan keluarga balita,anak, remaja, dan Lansia;
- g) Menyusun konsep kemitraan dalam bina ketahanan keluarga;
- h) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan program bina ketahanan keluarga;
- i) Meningkatkan jejaring kerja sama dengan mitra kerja dalam pembinaan bina ketahanan keluarga ;

- j) Melaksanakan penggerakkan mitra kerja dalam pembinaan bina ketahanan keluarga
- k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

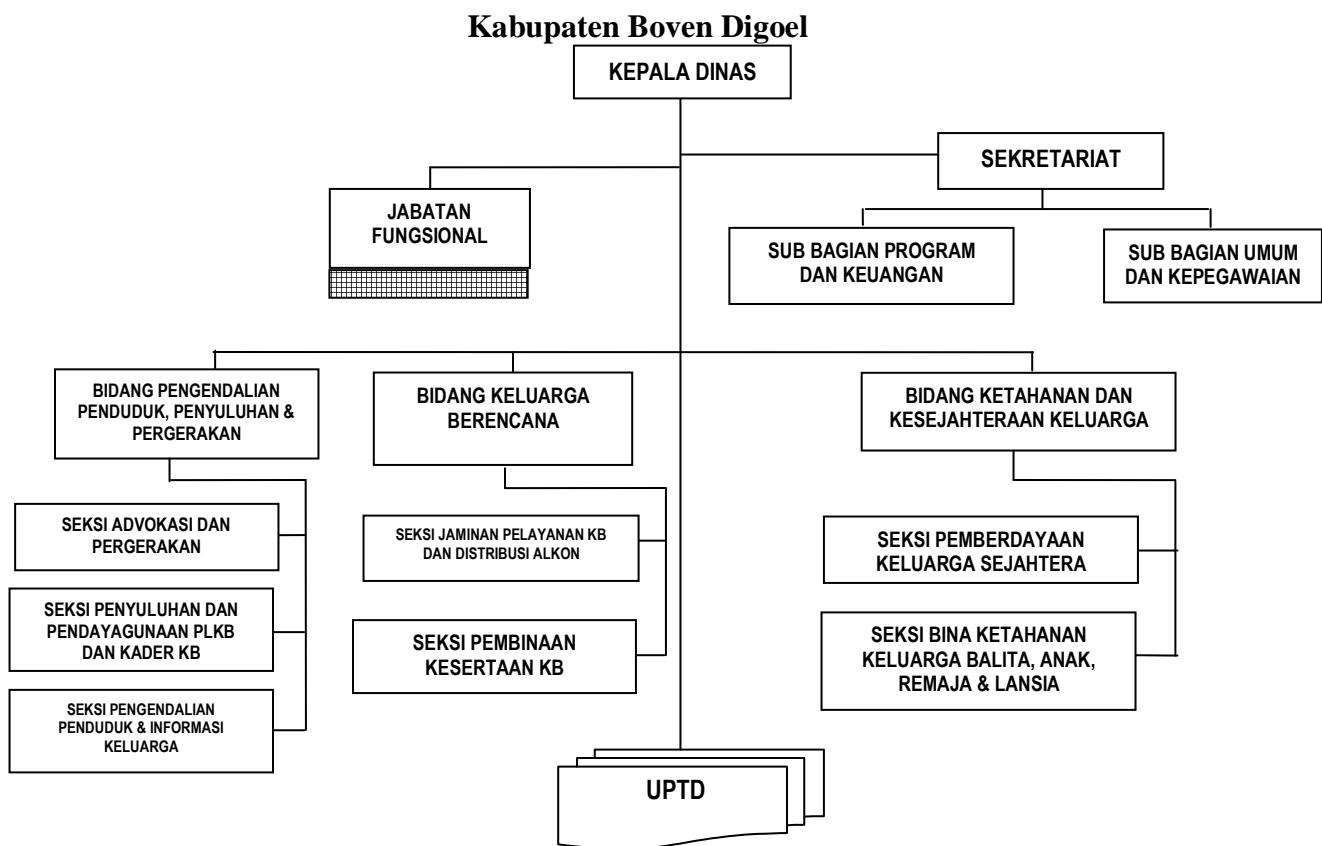
b. Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



2.2 Sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel berjumlah 28 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 16 orang dan Tenaga Kontrak/Honorer sebanyak 12 orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut ;

Tabel 2.2.1.a
Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	TK	Total
ASN	1	9	3	3				16
Kontrak		8	1	3				12

Tabel 2.2.1.b
Jabatan Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	TK	Total
Struktural	1	9	3					13
Fungsional								
Staff				3				3

Tabel 2.2.1.c
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah orang
IV c	1
IV.b	1
IV.a	1
III.d	2
III.c	6
III.b	2
III.a	
II.d	
II.c	1
II.b	2
II.a	
Total	16

Tabel 2.2.1.d
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

	Perempuan	Laki – Laki	Total
ASN	9	7	16
Kontrak	5	7	12

Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur DPPKB belum cukup memadai dibanding dengan bidang tugas yang harus dikerjakan, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, DPPKB Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

2.2.2. Perlengkapan

Keadaan perlengkapan yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2.a
Jumlah Perangkat Komputer**

No.	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Komputer	10	Unit	
2	Printer	5	unit	

**Tabel 2.2.2.b
Perangkat Lunak**

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Laptop	3	Unit	

**Tabel 2.2.2.c
Jumlah Sarana Pendukung**

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Meja kerja Biro	2	Unit	
2	Meja Kerja stengah Biro	15	Unit	

3	Kursi Hidrolik	2	Unit	
4	Kursi Kerja	15	Unit	
5	Sofa	1	Set	
6	Lemari Arsip	2	Unit	
7	AC	3	Unit	
8	TV	2	Unit	
9	Kulkas	1	Unit	
10	Dispenser	1	Unit	
11	Piring , gelas	5	Lusin	
13	Baki	4	Buah	
14	Mangkuk	4	Lusin	
15	Ketel listrik	2	Unit	
16	Gorden	15	set	
17	Taplak meja	5	set	
18	Sapu ijuk, sapu lidi	5	Buah	
19	Tempat sampah	8	Buah	
20	Tangkai pel	10	Buah	
21	Kemoceng/ sula	5	Buah	
22	Sikat wc	8	buah	
23	Keset kaki, serbet	20	Buah	

Fasilitas yang ada merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKB Kabupaten Boven Digoel. Sarana dan prasarana yang tersedia pada DPPKB Kabupaten Boven Digoel, belanja barang/ aset DPPKB diperoleh dari 2 (dua) sumber OPD yaitu belanja Aset yang lama dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB (seksi KB) dan belanja aset baru dari DPPKB Kabupaten Boven Digoel .

Sarana dan prasarana tersebut merupakan aset DPPKB dari belanja modal DPPKB Kabupaten Boven Digoel, aset lama dan baru yang secara umum terdiri dari :

1. Gedung Alat Kontrasepsi 1 bangunan
2. Gedung balai penyuluhan 2 bangunan
3. Kendaraan roda 2 20 unit

2.2.3 Keuangan

Pagu Anggaran yang di berikan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 7,500.000.000 (Tujuh koma lima milyar) dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut berikut;

Tabel 2.2.3.a
Pagu Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Boven Digoel
Tahun Anggaran 2016 – 2021

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Ket
2017	7,500.000.000	7,500.000.000	100%	-

Tabel 2.2.3.b
Realisasi kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Boven Digoel
Tahun Anggaran 2016

NO	KEGIATAN	REALISASI %	TAHUN	KET
1	Pelayanan administrasi perkantoran	100%	2016	Dilaksanakan
2	Pembinaan KB	300 wus	2016	Dilaksanakan
3	Pelayanan KIE KB	12 bulan	2016	Dilaksanakan
4	Pengadaan sarana&prasarana KB	3 unit bangunan	2016	Dilaksanakan
5	Operasional distribusi Alkon	100%	2016	Dilaksanakan
6	penyuluhan penanggul. narkoba PMS termasuk HIV AIDS	100 Remaja	2016	Dilaksanakan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Secara umum kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sudah dapat di evaluasi walupun masih dikatakan OPD baru dalam Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel dan juga berkaitan dengan fungsi Perangkat daerah antara lain sebagai berikut;

- a. Pembinaan, Pembimbingan, dan fasilitas pelaksanaan kebijakan nasional di Bidang Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, Pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
- g. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; perumusan kebijakan teknis, manajemen informasi dan pengembangan regulasi termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel pada tahun sebelumnya. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel dengan kinerja yang dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana pada periode sebelumnya, sedangkan

realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam tahun yang sama. Pencapaian target pembangunan KKBPK berkontribusi pula dalam pencapaian ukuran pembangunan manusia (Human Development Index) dan tujuan pembangunan SDGes (Sustainable Development Goals). Kinerja berkaitan dengan upaya Program KKBPK antara lain terlihat dari indikator atau capaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada penjelasan berikut ini;

Memperluas Jangkauan pelayanan KB dan akses di seluruh Kabupaten Boven Digoel

Mengingat kondisi objektif geografis dari Kabupaten Boven Digoel yang jangkauannya sering terkendala dalam melakukan kegiatan pelayanan KB dan akses terhadap masyarakat, maka perlu melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan intensitas pelayanan KB dengan pendekatan kontekstual(keruangan dan wilayah adat) baik secara statis maupun pelayanan secara mobile;
2. Peningkatan layanan akseptor KB secara sinergis berdasarkan karakteristik penduduk dan jenis alat kontrasepsi;
3. Penguatan jejaring dan komitmen tenaga di tingkat lini lapangan untuk pelaksanaan program KB di kecamatan dan desa / kampung atau kelurahan;
4. Pemberdayaan dan penguatan peran actor dan potensi local sebagai penggerak pelaksanaan program KB di tingkat desa/kampung.

Meningkatkan kualitas pelayanan KB

Secara normative kualitas pelayanan KB di Kabupaten Boven Digoel sudah cukup baik , hal ini salah satu pendorongnya adalah pada tahun 2017 BKKBN bekerjasama dengan P2KS Provinsi Papua telah melatih tenaga medis tentang pemasangan kontrasepsi implant dan IUD bagi bidan. Untuk itu sebagai tindak lanjut penggarapan program perlu peningkatan kualitas pelayanan melalui

1. Menyelenggarakan pelatihan pemasangan CTU dan konseling bagi bidan se- Kabupaten Boven Digoel;
2. Menyelenggarakan penyuluhan MOP dan MOW bagi (mitra kerja) se-Kabupaten Boven Digoel;
3. Menyelenggarakan pelatihan bagi actor local di tingkat desa / kampung sebagai penggerak program KKBPK;
4. Mendistribusikan dan menjamin ketersediaan alkon secara merata sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik calon peserta KB di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Menguatkan Advokasi dan KIE KB

Pemahaman tentang program KB bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel masih kurang. Hal ini berkaitan dengan terlalu luasnya wilayah yang akan di garap, sehingga kegiatan advokasi dan KIE terhadap tokoh formal maupun non formal di tingkat kabupaten perlu di tingkatkan. Untuk meningkatkan jangkauan advokasi dan KIE di daerah, maka perlu kegiatan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Komitmen Lintas sector dan pimpinan daerah, pimpinan lembaga non formal (adat, agama dan perempuan) tentang penting dan strategisnya program KKBPK dalam mewujudkan generasi emas papua;
2. Penggalangan sekutu dalam membangun kemitraan yang mendorong / mendukung pelaksanaan program KKBPK dalam mewujudkan generasi emas papua;
3. Peningkatan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda untuk menjadi leading sector dalam menjelaskan tentang program KKBPK.

Meningkatkan aktifitas ketahanan keluarga

1. Meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - a. Peningkatan advokasi, KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, LSOM, instansi terkait dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak di inginkan pada remaja;
 - b. Peningkatan peran dan fungsi serta kualitas dan kuantitas kegiatan PIK remaja/ Mahasiswa (PIK – R/M) dengan mendorong remaja atau mahasiswa untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan ,meningkatkan ketrampilan hidup dan jiwa kepemimpinan;
 - c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan remaja.Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM kader BKR dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orang tua.

2. Meningkatkan Peran dan Fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia;
 - a. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/ orang tua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL) serta penguatan 8 fungsi keluarga (agama, social, cinta Kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan) berdasarkan pendekatan wilayah adat di provinsi papua;
 - b. Meningkatkan pengetahuan serta penyuluhan tentang peran dan tugas orang tua dalam tumbuh kembang balita, anak dan remaja;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam perawatan dan pemberdayaan lansia.

2. Mengembangkan dan memantapkan pemberdayaan keluarga;
 - a. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya secara mandiri melalui penyelenggaraan advokasi KIE berbasis kontekstual tentang akses terhadap sumber daya ekonomi bagi keluarga;
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan berwirausaha bagi keluarga pra sejahtera khususnya anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) melalui sinergisitas dengan pihak lain .

3. Fasilitas kegiatan dan pembentukan pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS);

Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan data dan informasi kependudukan dan KB, konsultasi dan konseling balita dan anak, layanan konseling bagi keluarga remaja dan remaja, konseling pranikah, konseling KB dan kesehatan reproduksi , konseling keluarga harmonis, konseling keluarga lansia dan lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui balai penyuluhan KB yang ada tiap tingkat distrik

Meningkatkan ketersediaan kualitas data informasi kependudukan yang memadai

- a. Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu
- b. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi terpadu
- c. Peningkatan desiminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survey bagi seluruh pihak termasuk swasta dan akademisi
- d. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan yang bersumber dari registrasi penduduk.

- e. Peningkatan koordinasi termasuk fasilitas seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.
- f. Memperkuat penelitian dan pengembangan pengelolaan program KKBPK
 - 1. Penguatan penelitian Kependudukan, KB dan ketahanan keluarga
 - 2. Penyediaan dan publikasi hasil penelitian kependudukan, KB dan ketahanan keluarga
 - 3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang KKBPK

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Program pelayanan KKBPK yang dilaksanakan secara berkesinambungan sedikit banyak telah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian dalam penyelenggaraan program KKBPK masih terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

- 1. jumlah penduduk semakin bertambah dan persebaran tidak merata dilihat dari kepadatan penduduk berbeda antar Distrik. Hal ini menuntut penyediaan mutu dan kualitas fasyankes sesuai standar yang mudah diakses oleh setiap penduduk.
- 2. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan sebagai mitra kerja OPD DPPKB, baik dari segi jumlah, jenis SDM, kualitas dan persebaran di fasilitas pelayanan kesehatan dan Balai Penyuluhan KB, yang berdampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan program kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang berkualitas.
- 3. Perilaku dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti MKJP masih rendah.
- 4. Kasus penyakit yang menyebabkan kematian ibu dan bayi serta gizi buruk diantaranya disebabkan oleh perdarahan, preeklampsi, BBLR, Gizi Buruk Balita, Bumil KEK dan Anemia. Kasus penyakit non infeksi lainnya merupakan penyebab tidak langsung kematian ibu adalah keadaan empat terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak. Penyebab tidak langsung lainnya adalah rendahnya pemberian Fe, pola makan dan ketersediaan pangan serta promosi kesehatan, tingkat pengetahuan, dukungan data yang belum optimal, mobilitas yang tinggi serta tingkat kepedulian masyarakat yang rendah.

Adapun beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja program KKBPK antara lain :

1. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan propinsi dalam program pelayanan Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga. Adanya komitmen pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pelayanan publik Program KKBPK diantaranya adalah ketersediaan lingkungan, tatanan fasilitas baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, ketersediaan sumber daya program KKBPK yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan Balai Penyuluhan. Adanya dukungan anggaran program KKBPK dari pemerintah Daerah (APBD Kabupaten Boven Digoel), Pemerintah Pusat (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), Pemerintah Propinsi (APBD Propinsi) maupun anggaran hibah/bantuan luar negeri;
2. Adanya peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, diantaranya :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - b. Undang-Undang Dasar 19545 pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 - e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3. Terdapat komitmen global, regional dan nasional terkait KKBPK, mewajibkan pemerintah memberikan perhatian terhadap pemecahan masalah KKBPK;.

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan kesehatan diimplementasikan pada pelaksanaan pembangunan Nasional dengan menggunakan konsep paradigma sehat, yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999, sebagai “Gerakan Pembangunan yang Berwawasan Kesehatan”. paradigma sehat merupakan cara pandang pola pikir atau model pembangunan kesehatan yang melihat masalah KKBPK saling berkait dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat lintas sektor dan upayanya lebih diarahkan pada Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga, bukan hanya penyembuhan orang sakit tetapi saling menjaga yang sehat untuk menjadi tetap sehat.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH

3.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana struktur organisasi diarahkan sehingga pada gilirannya dengan visi yang tepat Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kabupaten Boven Digoel akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut maka visi Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Boven Digoel dirumuskan sebagai berikut :

" LEMBAGA YANG HANDAL MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG SERTA KELUARGA BERKUALITAS MENUJU BOVEN DIGOEL BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING "

Salah satu tanggung jawab OPD DPPKB adalah menjamin tersedianya pelayanan BANGGA KENCANA yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan BANGGA KENCANA dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta swasta.

Masyarakat Kabupaten Boven Digoel yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan dampak daripada belum menggunakan pelayanan keluarga berencana sehingga tidak mendukung untuk hidup sehat.

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan tadi maka Dinas pengendalian penduduk Kabupaten Boven Digoel perlu menetapkan misinya



secara jelas sebagai satu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga dinyatakan mampu membawa organisasi pada suatu fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan apa yang dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

3.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dirumuskan dengan mengacu/berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Dinas serta salah satu misi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang berbunyi "Menyelenggarakan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta dapat mengembangkan daya saing sumber daya manusia dan sumber daya alam

Pernyataan **Misi Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana** adalah sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan .
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi .
3. Memfasilitasi pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga.
4. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten
5. Mengembangkan Advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkwalitas

3.3 Keadaan Umum

Sejarah terbentuknya Boven Digoel terpisahkan dari sejarah berdirinya Merauke. Pada tanggal 12 Februari 1902, kapal uap *Van Goens* tiba di sungai Maro kabupaten

Merauke, menyusul kapal uap “*Van Swoll*” dan “*Nias*” yang telah tiba terlebih dahulu, dengan membawa Asisten Residen *Van Kroessen*. Pos pemerintahan Belanda mulai dibangun di Merauke, tepatnya pada tanggal 13 Februari 1902 dengan ditandai adanya pengibaran bendera Belanda pada hari berikutnya, yaitu tanggal 14 Februari 1902 di pos tersebut. Pada tahun 1907, ekspedisi militer kapal *Valk* menemukan adanya Boven Digoel di sisi utara kabupaten Merauke. Ekspedisi berikutnya dilakukan pada tahun 1909 menggunakan Kapal *Zwaluw*, kemudian disusul ekspedisi lain pada tahun 1912 dan 1913. Kemudian, Pemerintah Belanda mendirikan pos di tepi kiri sungai Digul, yaitu di *Assike* (*Asiki*), yang berjarak sekitar 355 km dari muara di selatan. Kamp Tanah Merah (yang selanjutnya menjadi ibukota Boven Digoel) diresmikan perencanaannya sebagai tempat pengasingan pada tahun 1919.

Periode 1919 hingga 1 April 1924, Boven Digoel sempat berstatus sebagai *Afdeeling* ‘sementara’ di bawah Karesidenan *New Guinea* (Papua). Hal ini dikarenakan asisten residen Boven Digoel masih tunduk di bawah asisten residen *Zuid Nieuw Guinea* di Merauke. Karesidenan *New Guinea* dibagi menjadi empat *Afdeeling* (dipimpin asisten residen), yaitu *West Nieuw Guinea* dengan ibukota di Fakfak, *Noord Nieuw Guinea* dengan ibukota di Hollandia (Jayapura), *Afdeeling Boven Digul* dan *Zuid Nieuw Guinea* dengan ibukota di Merauke. Dengan alasan tidak efektif, Karesidenan *New Guinea* (Papua) kembali digabung dengan karesidenan Ambon. Meskipun pada tahun 1924 melalui *Staatsblad van Nederlandsch Indië over het jaar 1923 No. 413* *New Guinea* (Papua) kembali diturunkan statusnya menjadi *Onderafdeeling*, unit pemerintahan di Boven Digul tetap bertahan di bawah pimpinan seorang kontrolir (pimpinan *Onderafdeeling*) hingga akhir kekuasaan Belanda di Papua pada tahun 1963.

Dengan Keputusan Gubernur *Staatsblad* 529 tertanggal 10 Desember 1926, wilayah Sungai Digul dipisahkan dari *Onderafdeeling Nieuw Guinea* menjadi sebuah pemerintahan setingkat *Onderafdeeling*, dengan pusat pemerintahan di Tanah Merah, dan di bawah *Afdeeling Amboina* (Amboina).

Tanggal 26 Januari 1927 kapal api milik pemerintah, *Fomalhout*, mulai memasuki Sungai Digoel, yang dipimpin *Kapten L.Th. Becking*. Pada saat rombongan Kapten Becking datang, kapal penuh dengan peralatan dan logistik untuk 120 tentara, 60 kuli, dan rombongan pertama para tahanan untuk kehidupan selama tiga bulan. Keesokan harinya tanggal 27 Januari pekerjaan pembukaan hutan pertama kali dimulai. Pada mulanya, yang ada di Tanah Merah hanyalah pemerintah militer. Pemerintah sipil baru ada setelah tanggal 1 November 1927 dan berlangsung hingga awal bulan Agustus 1934 ketika pemerintah militer mengambil alih pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Boven Digoel dikenal dengan sebutan Digul Atas, dan digunakan sebagai tempat pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Digul Atas terletak di tepi Sungai Digul Hilir dimana Kamp Boven Digoel dipersiapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menampung tawanan Pemberontakan PKI di Jawa Barat dan Sumatra pada bulan November tahun 1926. Selanjutnya, Boven Digoel juga digunakan sebagai tempat pembuangan pergerakan nasional. Jumlah penghuni tertinggi terjadi pada tahun 1929, ketika penghuni kamp mencapai 2.100 orang (terdiri dari 1.170 laki-laki, 400 perempuan, dan 500 anak-anak). Dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun setelahnya dipulangkan 1.500 orang. Di antara tokoh-tokoh pergerakan yang pernah dibuang ke sana antara lain: Mohammad Hatta, Bondan, Ali Archam, Sutan Syahrir, Sayuti Melik, Marco Kartodikromo, Chalid Salim, Lie Eng Hok, Muchtar Lutfi, dan Ilyas Ya'kub.

Pada waktu Perang Pasifik meletus dan Jepang menduduki Indonesia, tawanan Boven Digoel diungsikan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu didasari kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap di Boven Digoel. Diharapkan orang-orang Indonesia yang dibawa ke Australia akan membantu Belanda. Namun ternyata, tahanan politik ini mempengaruhi serikat buruh Australia untuk memboikot kapal-kapal Belanda yang mendarat di Benua Kanguru. Setelah sekutu berhasil memperoleh kemenangan, tawanan itu dikembalikan ke tempat asalnya di Indonesia.

Sejarah singkat tersebut mengawali pembahasan tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Boven Digoel yang menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Boven Digoel. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Boven Digoel memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini, dan/atau untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasilan pembangunan daerah Kabupaten Boven Digoel. Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Boven Digoel akan memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi Kabupaten Boven Digoel menggambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan, gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Boven Digoel.

Karakteristik Wilayah

Karakteristik wilayah menjelaskan luas dan batas wilayah administrasi, kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi iklim, dan kondisi penggunaan lahan Kabupaten Boven Digoel.

Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Boven Digoel memiliki luas wilayah 27.108,29 km² dan berada di tepi kanan Provinsi Papua dimana kabupaten tersebut merupakan salah satu dari 4 (empat) kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Dalam pembentukan wilayah administrasi, Kabupaten Boven Digoel memiliki 20 Distrik, sebagai berikut.

Tabel 3.3.1
Luas Wilayah Kabupaten Boven Digoel Menurut Distrik

Distrik	Luas/Area (km ²)	Rasio Terhadap Total
1. Jair	3.061,73	11,30%
2. Subur	2.660,09	9,81%
3. Ki	2.050,60	7,56%
4. Mindiptana	448,17	1,65%
5. Iniyandit	379,65	1,40%
6. Kombut	660,93	2,44%
7. Sesnukt	1.306,63	4,82%
8. Mandobo	2.699,51	9,96%
9. Fofi	2.466,70	9,10%
10. Arimop	1.311,77	4,84%
11. Kouh	467,25	1,72%
12. Bomakia	1.082,95	3,99%
13. Firiwage	1.219,97	4,50%

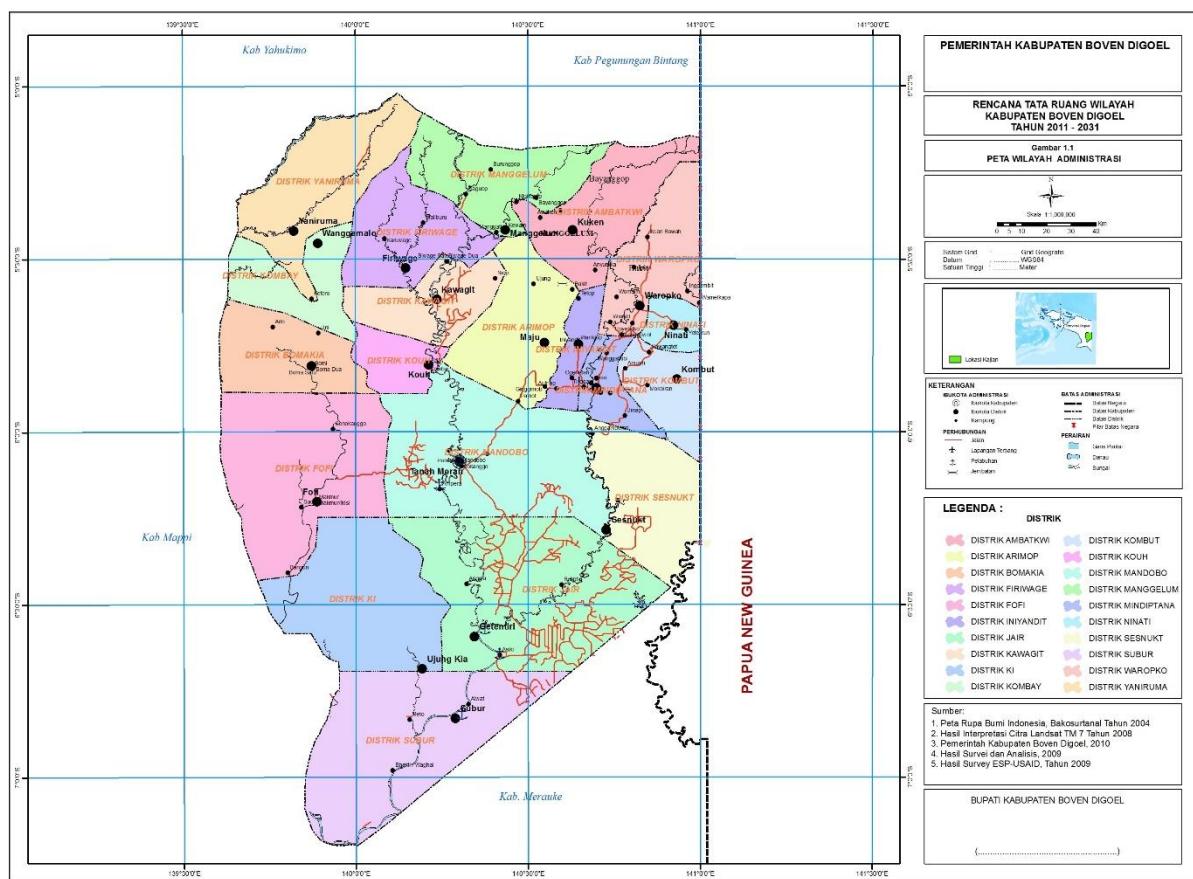
Distrik	Luas/Area (km ²)	Rasio Terhadap Total
14. Manggelum	1.289,65	4,76%
15. Yaniruma	1.611,04	5,94%
16. Kawagit	904,23	3,34%
17. Kombay	830,91	3,07%
18. Woropko	1.086,97	4,01%
19. Ambatkwi	1.282,38	4,73%
20. Ninati	287,07	1,06%
Jumlah	27.108,29	100,00%

Sumber: Boven Digoel Dalam Angka 2015

Dari kedua puluh distrik yang tersebar di Kabupaten Boven Digoel, distrik terluas di Kabupaten Boven Digoel adalah Distrik Jair dengan luas sebesar 3.061,73 km² atau 11,30 persen dari total luas wilayah Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan distrik dengan luas terkecil adalah Distrik Ninati yang hanya memiliki luas sebesar 287,07 km² atau 1,06 persen dari total luas wilayah Kabupaten Boven Digoel. Berdasarkan batas wilayahnya, Kabupaten Boven Digoel berbatasan langsung dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya, yaitu:

- Sebelah Utara: Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo
- Sebelah Timur: Negara Papua New Guinea,
- Sebelah Selatan: Kabupaten Merauke
- Sebelah Barat: Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat.

Tabel 3.3.2
Peta Administratif Kabupaten Boven Digoel, 2015



Sumber: RTRW Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2031

Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Boven Digoel berada pada wilayah penghubung antara daerah pantai di selatan dengan wilayah-wilayah pegunungan tengah membentang antara pada $4^{\circ} 98'$ sampai dengan $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan $139^{\circ} 90'$ sampai dengan 141° Bujur Timur. Kabupaten Boven Digoel memiliki iklim panas, topografi bervariasi, kondisi dataran yang berbukit-bukit hingga pegunungan dan dataran rendah, serta ketinggian wilayah antara 10-2.077 meter di atas permukaan laut.

Posisi Kabupaten Boven Digoel cukup strategis sebagai wilayah penghubung antara daerah pantai di selatan dengan wilayah-wilayah pegunungan tengah. Dengan demikian arus barang/jasa ke daerah pegunungan tengah sangat terbantu dengan lancarnya transportasi/komunikasi dari selatan ke utara melalui kabupaten Boven Digoel. Sebagian besar wilayah Boven Digoel masih berupa hutan, perlu adanya pembangunan yang mengarah pada aksesibilitas antardesa/kampung kawasan terpencil.

Kondisi Topografi

Kabupaten Boven Digoel berada pada ketinggian 10 meter hingga 2.077 meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayah pedataran rendah pesisir selatan Provinsi Papua meliputi lima kabupaten dengan karakteristik umum yang hampir sama, yakni: Merauke, Boven Digoel, Asmat, Mappi dan Mimika. Namun, pada Boven Digoel selain terdapat rawa, dataran, dan wilayah berombak, juga terdapat wilayah yang bergelombang, berbukit dan bergunung, yakni pada sektor utara wilayahnya yang berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Bumi Kabupaten Boven Digoel dapat dikelompokkan ke dalam lima wilayah fisiografi, yakni:

(1) Wilayah pedataran

Luas wilayah pedataran adalah 1.926.857,96 ha (71,08 %). Berada pada ketinggian 25-100 m di atas permukaan air laut. Wilayah ini dibelah oleh beberapa sungai, yang terbesar adalah Sungai Digoel dengan panjang ± 683 km, Sungai Kao ± 200 km, dan Sungai Mandobo ± 342 km.

(2) Wilayah gambut/rawa

Wilayah gambut/rawa dijumpai pada ketinggian 10-30 m, dengan luas wilayahnya adalah 30.278 ha (hasil hitungan GIS November 2014). Area ini selalu tergenang dan dipengaruhi oleh endapan sungai dengan tebal bahan organiknya lebih dari 2 m. Rencana pengembangan gambut di Distrik Yaniruma, Kombay, Bomakia, Jair, Sesnukt dan Distrik Subur.

(3) Wilayah bergelombang

Wilayah bergelombang seluas 352.407,90 ha (13,00 %) dan dijumpai pada ketinggian 100-250 m dengan kemiringan tanah yang juga diiris oleh sungai-sungai yang mengalir ke pedataran.

(4) Wilayah perbukitan

Luas wilayah perbukitan mencapai 143.402,91 ha (5,29 %) dan dijumpai pada ketinggian 250-500 m, merupakan hulu sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Digoel maupun Sungai Mappi.

(5) Wilayah pegunungan

Wilayah pegunungan dijumpai di ketinggian 500-2.077 m pada sektor utara wilayah hingga perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan luas areanya sebesar 95.692,30 ha (3,53 %). Wilayah ini merupakan bagian hulu sungai-sungai di

Kabupaten Boven Digoel. Gradien atau verval sungai di wilayah ini cukup tinggi bahkan dijumpai air terjun.

Geologi

Secara umum, bentuk bentang alam Kabupaten Boven Digoel dicirikan oleh suatu ketinggian di bagian Utara dan rendahan di bagian Selatan. Dari 20 distrik, hanya 3 distrik yang memiliki bagian bentang alam curam hingga terjal, yaitu distrik Woropko, Ambatkwi dan Manggelum. Sisanya ke arah Selatan, umumnya memiliki bentuk bentang alam berupa datar hingga agak curam.

Perbedaan bentuk-bentuk bentang alam ini sangat dipengaruhi oleh pola struktur geologi yang berkembang kuat di bagian Utara akibat dari proses kegiatan tektonik. Tumbukan lempeng antara lempeng Australia di bagian Selatan dan lempeng Fasifik di bagian Utara menghasilkan jalur zona anjak Pegunungan Tengah, yaitu sepanjang gunung Jayawiyaya. Ketiga distrik di atas merupakan pinggiran (tepi selatan) dari lajur anjak pegunungan tengah tersebut. Oleh karenanya, ketiga distrik itu memiliki lebih banyak variasi sumberdaya alam dengan tatanan geologi yang rumit dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya.

Sumber daya tanah Kabupaten Boven Digoel belum banyak diteliti untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Menurut penelitian Soeprapto-Hardjo (1971), pada wilayah Kabupaten Boven Digoel dijumpai jenis-jenis tanah Organosol, Aluvial, Posolik Merah Kuning, Mediteran Merah Kuning, Regosol, dan Litosol. Selain itu, secara sporadis, di bawah endapan bahan aluvial dijumpai tanah-tanah regosol seperti pada tepian Sungai Digoel di Tanah Merah, yang merupakan tempat pengambilan Bahan Galian C, berupa pasir dan sirtu.

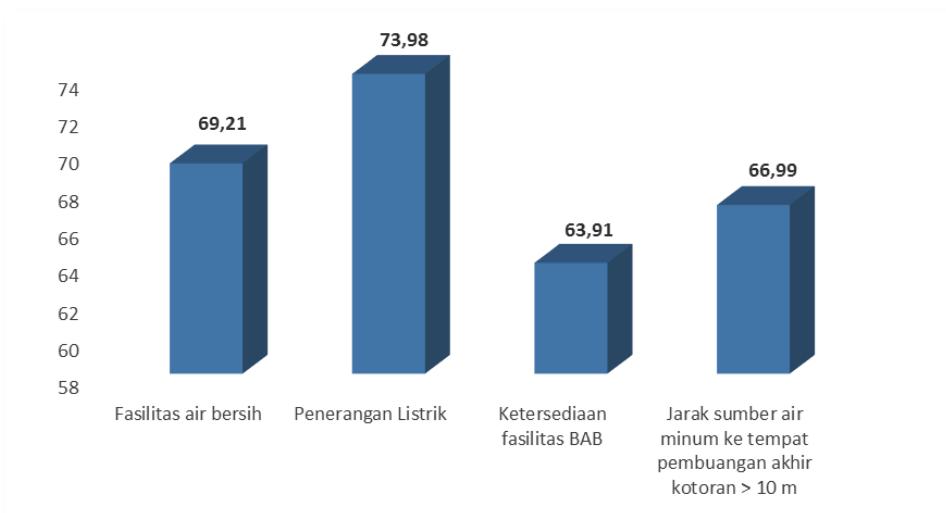
Berdasarkan slope analysis pada peta topografi, yang disertai pula dengan pengecekan lapangan, dibuatlah peta Kemiringan Tanah. Kemiringan tanah pada Kabupaten Boven Digoel dinyatakan dengan persentase “Lereng 0-2 persen”, ini berarti pada jarak mendatar 100 meter antara titik (A) ke titik (B) terdapat beda tinggi 2 meter. Selain itu, dengan memperhatikan informasi jenis tanah dan topografi, diperoleh data kemiringan tanah, tebal solum, tekstur, drainase, serta ada tidaknya erosi

Fasilitas Perumahan

Fasilitas perumahan suatu wilayah akan baik jika memenuhi standar perumahan layak huni. Berdasarkan kajian dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013, rumah tangga Kabupaten Boven Digoel sebanyak 69,21 persen sudah memakai air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, sebanyak 73,98 persen sudah menggunakan penerangan listrik, 63,91 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar, serta 66,99 persen masyarakat yang rumahnya memiliki sumber air minum dengan jarak ke pembuangan tinja/kotoran lebih dari 10 meter.

Gambar 3.3.1

Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Boven Digoel, 2013



Sumber: BPS Kabupaten Boven Digoel, 2013

Rasio Panjang Jalan terhadap Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor di Kabupaten Boven Digoel semakin lama semakin bertambah hingga mencapai 5.039 unit pada tahun 2013. Dengan panjang jalan sepanjang 1.136,58 km, maka dapat dihitung rasio panjang jalan terhadap kendaraan bermotor sebesar 23 meter yang berarti satu kendaraan bermotor memiliki panjang jalan sepanjang 23 meter.

Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas selama tahun 2012 s.d. 2014 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Hal tsb diatas menggambarkan kasus minuman keras memiliki persentase tertinggi yakni 56,00 persen, diikuti kasus penganiayaan 28 persen, kasus pencurian 8,00 persen, dan kasus penipuan 4,00 persen. Perlu diingat bahwa data ini sebagian besar hanya bersumber dari ibukota distrik dan merupakan kasus yang terpantau/terdata oleh pemerintah daerah.

Jumlah Demonstrasi

Dalam ranah demokrasi pembangunan saat ini, aspirasi masyarakat menjadi salah satu ukuran positif dalam menyambut era demokrasi sehingga pemerintah daerah memiliki kontrol dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu jalur dalam menyalurkan aspirasi adalah dengan melakukan demokrasi namun tetap sesuai koridor dan dilaksanakan tanpa adanya kerusuhan atau pengrusakan. Secara umum, jumlah demonstrasi di Kabupaten Boven Digoel disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.4
Jumlah Demo di Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2013-2014

No	Uraian	2013	2014	Jumlah	%
1	Bidang politik	1	3	4	57,14
2	Ekonomi	0	0	0	0
3	Kasus pemogokan kerja	0	0	0	0
4	Unjuk rasa lainnya	1	2	3	42,86
Jumlah		2	5	7	100,00

Sumber : Badan Kesbang Linmas

Dari tabel di atas menunjukan bahwa unjuk rasa bidang politik masih lebih mendominasi (57,14%) disusul unjuk rasa lainnya, baik berkaitan dengan tuntutan kebijakan, sosial budaya, maupun menyangkut sengketa pertanahan (42,86%).

Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio lulusan S1/S2/S3 maupun rasio ketergantungan. Hasil olahan rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/S2/S3 semakin banyak. Meskipun begitu, secara absolut angka 792 (1,19%) dari total jumlah penduduk merupakan angka yang sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduk total pada periode tersebut

BAB IV

SITUASI UPAYA BANGGA KENCANA

Situasi upaya dan kegiatan strategis program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA) dimasyarakat merupakan hasil dari beberapa kegiatan yang sudah menjadi target kegiatan di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama tahun 2019 ini, adapun beberapa uraian upaya BANGGA KENCANA adalah sebagai berikut :

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, upaya program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2019 secara umum adalah melakukan konsolidasi dan penyegaran kembali komitmen terhadap program BANGGA KENCANA nasional kepada seluruh penyelenggara negara, stakeholder terkait, dan mitra kerja program. Secara khusus, upaya program yang dilakukan adalah dengan merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Program KKB Nasional 2015-2019 dan juga Renstra Kabupaten 2016-2021.

Upaya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk pemantapan kelangsungan program dan kelembagaan, peningkatan kinerja program di setiap tingkatan wilayah, serta pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana yang menyeluruh dan bermutu dalam rangka membantu terwujudnya keluarga kecil berkualitas. Gambaran pelaksanaan kinerja program KKB nasional yang merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2011 meliputi empat program pokok, yaitu (1) Program Kependudukan dan KB; (2) Program Pelatihan dan Pengembangan; (3) Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya; serta (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan program BANGGA KENCANA , maka pada setiap awal tahun selalu dilakukan penyegaran kembali komitmen terhadap program BANGGA KENCANA Kabupaten dari para penyelenggara daerah, stakeholder, pimpinan OPD dan mitra

kerja program melalui forum-forum yang berskala regional, yaitu Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, dan Rapat Koordinasi Teknis.

Melalui forum-forum pertemuan tersebut dilakukan sosialisasi dan desiminasi visi, misi, kebijakan, strategi, dan pokok-pokok program serta kegiatan dalam Rencana Strategis Program KKB Kabupaten tahun 2016-2021 dan disinkronkan dengan rencana aksi dan operasionalisasi kegiatan prioritas.

Untuk mencapai target yang tercantum dalam RK OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2019, telah melaksanakan 12 (dua belas) program dengan 41 Komponen dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel, telah memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengendalian dan pemantauan kinerja. IKU merupakan akumulasi kinerja dari pencapaian Kontrak Kinerja Kabupaten (KKK) tingkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel, dalam pengendalian dan pemantauan kinerja. Pengendalian dan pemantauan kinerja tersebut dilakukan melalui 3 tahap yaitu bulanan, semesteran dan tahunan. Evaluasi kinerja bulanan dilakukan melalui rapat pengendalian program dan anggaran (RADALGRAM), yang dilaksanakan rutin setiap bulan. RADALGRAM dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel. Hal itu menunjukkan komitmen pimpinan dan anggota organisasi untuk mengendalikan pencapaian kinerja program dan organisasi. Dalam RADALGRAM selain dibahas permasalahan-permasalahan program juga dibicarakan strategi dan upaya pemecahan masalahnya serta rencana tindak lanjutnya.

Terdapat berbagai sumber data untuk mengukur pencapaian kinerja Program BANGGA KENCANA di DPPKB Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019. Sumber data tersebut adalah Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program BANGGA KENCANA dari PLKB juga Mitra kerja, Sistem pencatatan dan pelaporan program BANGGA KENCANA Kabupaten (mekanisme dan alur pelaporan terlampir) terdiri dari pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi (F/II/KB), pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan (F/I/DALLAP), dan pendataan keluarga (R/I/KS dan F/I/MDK). Pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kontrasepsi, melalui F/II/KB, dikumpulkan secara berjenjang setiap bulan mulai dari klinik KB yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten

dan kota, provinsi dan pusat. Dalam formulir F/II/KB terekam data antara lain jumlah peserta KB baru (per metode kontrasepsi), data kegagalan dan komplikasi serta persediaan alat dan obat kontrasepsi. F/II/KB merupakan sumber data untuk mengukur pencapaian kinerja indikator-indikator (a) Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru, (b) Jumlah Peserta KB Baru mandiri, (c) Persentase Jumlah Peserta KB Baru MKJP, (d) Persentase Peserta KB baru pria, (e) Jumlah Peserta KB baru KPS dan KS I.

Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan, dengan menggunakan formulir F/I/Dallap dikumpulkan bulanan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat. Dalam formulir F/I/Dallap terekam data antara lain peserta KB aktif, ganti cara, kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan KPS dan KS-I. F/I/Dallap merupakan sumber data untuk mengukur pencapaian kinerja indikator-indikator (a) Jumlah Peserta KB aktif, (b) Jumlah Peserta KB aktif KPS dan KS I, (c) Persentase Peserta aktif mandiri, dan (d) Persentase Peserta KB aktif MKJP.

Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga, dengan menggunakan formulir R/I/KS, dikumpulkan dalam periode setahun sekali. Data yang dikumpulkan melalui pendataan keluarga meliputi data demografi, data kesertaan ber KB seperti unmet need dan peserta KB menurut jalur pelayanan, serta data tahapan Keluarga Sejahtera.

Pendataan keluarga dilakukan oleh Kader Pendata terlatih yang mendapatkan pembinaan dan supervisi oleh PLKB/PKB maupun oleh jajaran di atasnya, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat.

Survey intern BKKBN dalam hal ini Mini Survey dan Survey RPJMN dilakukan setiap tahun untuk mengukur pencapaian kinerja indikator-indikator (a) Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia yang memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak serta ketahanan keluarga remaja dan lansia; (b) Persentase PUS, WUS, remaja, dan keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa cetak, elektronik dan media luar ruang.

Sementara itu data hasil Sensus Penduduk 2010 digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan penduduk, sedangkan data hasil SDKI 2012 digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja indikator (a) Tingkat kesertaan ber-KB pasangan usia subur (CPR) dan (b) Unmet Need.

4.1 Upaya dan Kegiatan Strategis Program BANGGA KENCANA

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, upaya program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2019 secara umum adalah melakukan konsolidasi dan penyegaran kembali komitmen terhadap program BANGGA KENCANA nasional kepada seluruh penyelenggara negara, stakeholder terkait, dan mitra kerja program. Secara khusus, upaya program yang dilakukan adalah dengan merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Program KKB Nasional 2015-2019 dan juga Renstra Kabupaten 2016-2021.

Upaya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk pemantapan kelangsungan program dan kelembagaan, peningkatan kinerja program di setiap tingkatan wilayah, serta pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana yang menyeluruh dan bermutu dalam rangka membantu terwujudnya keluarga kecil berkualitas. Gambaran pelaksanaan kinerja program KKB nasional yang merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2011 meliputi empat program pokok, yaitu (1) Program Kependudukan dan KB; (2) Program Pelatihan dan Pengembangan; (3) Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya; serta (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan program BANGGA KENCANA , maka pada setiap awal tahun selalu dilakukan penyegaran kembali komitmen terhadap program BANGGA KENCANA Kabupaten dari para penyelenggara daerah, stakeholder, pimpinan OPD dan mitra kerja program melalui forum-forum yang berskala regional, yaitu Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, dan Rapat Koordinasi Teknis. Melalui forum-forum pertemuan tersebut dilakukan sosialisasi dan desiminasi visi, misi, kebijakan, strategi, dan pokok-pokok program serta kegiatan dalam Rencana Strategis Program KKB Kabupaten tahun 2016-2021 dan disinkronkan dengan rencana aksi dan operasionalisasi kegiatan prioritas.

Untuk mencapai target yang tercantum dalam RK OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel pada Tahun 2019, telah melaksanakan 12 (dua belas) program dengan 47 Komponen dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB penyediaan jasa surat - menyurat sebanyak 500 lembar dalam tahun berjalan telah dilakukan pengiriman laporan laporan/ surat antara lain melalui Jasa Kantor Pos, Kilat khusus selain itu juga ada pemakaian Prangko dan meterai

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB antara lain penyediaan Komunikasi jumlah penggunaan TV kabel sebanyak 12 kali, penggunaan listrik dalam tahun berjalan sebanyak 18.500 KWH, penggunaan profil air sebanyak 51 profil, penggunaan air galon sebanyak 100 kali da jumlah pemakaian V-SAT sebanyak 1 Terra yang disediakan dalam satu tahun.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pada Tahun 2019 Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jumlah Kendaraan Operasional yang ada 1 kendaraan roda empat Es.II, 1 Kendaraan roda empat jenis Triton (Mupeng), 5 kendaraan roda dua untuk PLKB masih terdapat 5 (lima) bidang yang belum memiliki Kendaraan Operasional yaitu Bidang Keluarga Sejahtera dan Bidang Keluarga Berencana serta Kendaraan Dinas Jabatan untuk Pejabat eselon II karena kondisi kendaraan sudah mencapai 15 tahun. Namun kendaraan yang perpanjang STNK terus dilaksanakan tiap tahun nya sebanyak 27 unit

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB penyediaan Administrasi Keuangan antara lain :

Sistem Pembayaran Gaji Pegawai sejak bulan Januari s/d Desember 2019 dibayarkan langsung ke rekening masing-masing pegawai melalui Bank Papua cabang Tanah Merah, Khusus untuk pengalokasian pembayaran gaji tahun 2019 tidak mengalami masalah karena tidak terjadi kekurangan (minus) dana untuk pembayaran gaji pegawai.

Termasuk pembayaran gaji Honorer sebanyak 32 orang

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB penyediaan ATK sebanyak 36 jenis antara lain :

- Kertas HVS F4
- Kertas HVS A4
- Tinta Printer Canon Sedang
- Tinta Printer Canon Sedang Warna
- Tinta Stempel
- Catridge Printer (Hitam)
- Catridge Printer (Warna)
- Tinta stempel
- Penggaris Besi 60 cm
- Penggaris Besi 100 cm
- Map Ordner no.403
- Map Batik Kain
- Map Batik Biasa
- Staples 3
- Staples 10
- Bolpoint Tanda Tangan
- Bolpoint Biasa
- Isi Staples Besar

- Buku Kwitansi
- Paper Clip Daito 03
- Paper Clip Warna
- Pensil 2B
- Binder Clips No 605
- Binder Clips No 200
- Lem kertas
- Amplop putih
- Amplop coklat kecil
- Amplop coklat besar
- Kertas cover putih
- Penghapus Karet
- Stabilo
- Plakban Hitam
- Map Plastik
- Buku Agenda Besar
- Paper Clip Sedang
- Buku Ekspedisi

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 14800 lembar, baik itu kegiatan kesekretariatan maupun kegiatan masing-masing Bidang.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB meliputi:

- Saklar double – Tempel
- Saklar Tunggal-Tempel
- Lampu TL 1 x 23 Watt

- Lampu XL Philips complit 20 Watt
- Lampu pijar 40 Watt
- Lampu SL 1 x 42 Watt
- Veeting lampu kecil

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB peralatan dan perlengkapan Gedung kantor sebanyak 17 jenis meliputi:

- Sabun cuci tangan
- Pembasmi Hama HIT
- Pewangi Ruangan
- Pembersih kaca
- Tissue kering
- Pembersih Tegel
- Sikat WC
- Pewangi Kloset
- Pewangi Pakaian
- Keset kaki
- Sikat WC berganggang
- Kain Pel
- Pewangi mobil
- Sabun cuci

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebanyak 3 jenis meliputi:

- Belanja bulanan koran papua selatan pos
- Belanja buku bidang pengendalian penduduk, KB, dan Keluarga Sejahtera.

Penyediaan bahan logistic kantor

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB penyediaan bahan logistik kantor antara lain : Bahan Bakar Minyak berjumlah 2.985 liter (solar maupun bensin) yang di distribusikan bagi seluruh ASN yang berada di OPD Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB penyediaan Makanan dan Minuman yang selalu disajikan setiap Rapat Umum Staf yang dilakukan setiap bulan sekali sejumlah 378 kotak dan belanja makan minum tamu berjumlah 50 kotak dengan jumlah 300 kotak dalam tahun berjalan.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGAKENCANA dilingkungan DPPKB maka sebanyak 31 kali dalam satu tahun melakukan perjalanan dinas dengan tujuan dan staf yang melakukan perjalanan berbeda beda sesuai dengan Undangan ataupun Radio gram kegiatan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan Gedung kantor

Pengadaan dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB Perlengkapan gedung Kantor yang di sediakan sebanyak 2 unit untuk memenuhi beberapa kebutuhan untuk memenuhi fasilitas online.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diservice pada tahun 2019 untuk roda empat adalah sebanyak 3 unit dan untuk roda dua 18 unit.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB perbaikan peralatan dan mesin kerja sebanyak 30 unit yang mengalami perbaikan - perbaikan lebih dari satu kali antara lain;

- Service Laptop 8 unit
- Service Personal Computer 12 unit
- Service Printer 10 unit

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA dilingkungan DPPKB pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan pakaian dinas meliputi:

- Pakaian sipil harian keki : 18 pegawai/steel
- Pakaian sipil harian putih : 31 pegawai/steel
- Baju Batik Khas Papua : 28 pegawai/steel
- Pakaian cleaning service : 1 steel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program dilingkungan DPPKB jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN Es.IV yang berjumlah 4 orang.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program dilingkungan DPPKB yaitu mengadakan bimtek sebanyak 3 orang ASN dan 1 orang honorer yang dilakukan di Yogyakarta.

Bimbingan teknis pengembangan standar operasional prosedur OPD

Kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019 untuk mendukung Pelaksanaan Program dilingkungan DPPKB yaitu mengadakan bimtek sebanyak 1 orang ASN Es.III dan 1 orang ASN Es.IV yang dilakukan di Malang.

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)Program Kependudukan, KB Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini definisi lainnya adalah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Esensi dari sistem LAKIP bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut , system siklus LAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/ sasaran Strategi OPD DPPKB Kabupaten Boven Digoel . pencapaian hasil 1 dokumen

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang efisiens dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat sebuah dokumen laporan keuangan semesteran, hal ini dimaksudkan agar kegiatan kegiatan program per enam bulan dapat dilihat kemajuan pencapaiannya di

masyarakat namun Sebelum laporan keuangan dibuat, dan agar supaya laporan dapat dikatakan akurat, maka terlebih dahulu dilakukan Rapat internal bagian keuangan OPD dan Rekonsiliasi tentang penyusunan Laporan Keuangan ke BPKAD agar sesuai dengan Regulasi keuangan yang ada. Keluaran yang dihasilkan adalah satu (1) dokumen laporan keuangan semesteran.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang efisiens, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kegiatan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat pula sebuah laporan keuangan Akhir Tahun yang akan dikirim ke BPKAD dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. Dan keluarannya adalah satu (1) Dokumen Laporan keuangan akhir tahun .

Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-SKPD

Kegiatan ini merupakan salah satu strategi dalam upaya memasukan isu-isu parameter kependudukan kedalam Renstra di kabupaten Boven Digoel selama lima tahun yang akan datang, diharapkan isu-isu Parameter Kependudukan bisa dimasukan/diintegrasikan kedalam penyusunan Renstra tersebut, maka DPPKB bermitra dengan BKBN , Stake Holder, dan Mitra kerja terkait baik ditingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota untuk meng-advokasi kepada para pihak, agar dalam menyusun RPJMD/Renstra Kabupaten bisa memasukan Isu-isu Parameter Kependudukan dalam Pelaksanaan Program BANGGA KENCANA di Tingkat Kabupaten, sehingga kegiatan operasional Program Kependudukan dan pengendalian Kuantitas pendudukan bisa dijadikan program prioritas/strategis dan dialokasikan anggarannya disetiap tahun anggaran. Indikator pencapaian yang di hasilkan adalah 3 dokumen antara lain; Dokumen Rencana Strategi OPD, Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen RKA DPA OPD.

Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana untuk pemerataan pelayanan KB yang berkualitas, dapat terjangkau oleh masyarakat terutama pada Distrik Kombut yang masing masing kampung memiliki sasaran sebanyak 140 orang.

Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin (OTSUS)

Kegiatan ini berupa pelayanan KB dan pemasangan alat kontrasepsi bagi OAP sebanyak 270 orang di Distrik Mindiptana, Jair, Waropko, dan Mandobo.

Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

Kegiatan ini berupa pendistribusian alat kontrasepsi di 18 Faskes diwilayah kerja Kab. Boven Digoel.

Pembinaan Kampung KB

Kegiatan ini berupa peningkatan dan ketrampilan bagi kader KB yang diikuti oleh 152 orang di Kampung Naga Distrik Jair.

Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan

Kegiatan ini berupa pelayanan program KB yaitu Tanah Merah, Kamka, Mindiptana, Aiwat dan Naga.

Biaya Operasional Pergerakan di Kampung KB

Kegiatan ini berupa penyuluhan dan pelatihan bagi kader PPKBD, Sub PPKBD, KB, BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R di 20 Kampung.

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (OTSUS)

Kegiatan ini berupa penyuluhan/memberikan pengetahuan perempuan OAP tentang kesehatan reproduksi individu kepada 100 orang di Distrik Arimop, Ninati, Waropko dan Kia.

Desa Stunting (BOKB)

Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kampung yaitu: Kampung Ujung, Arimbit, Aroa, Somi, Aifo, Butiptiri, Anggai, Watemu, Kombay dan Mawan. Kegiatan ini bertujuan tuk menurunnya kasus stunting bagi balita.

Penyusunan Raperda Kampung KB

Kegiatan ini berupa rapat lintas OPD terkait, di Provinsi dan Jakarta guna terbentuknya 1 Perda Kampung KB di Kab. Boven Digoel.

Penggandaan Sarana KIE, KIE KIT dan Media Lini Lapangan

Belanja modal peralatan dan mesin alat kedokteran KB berupa: BKB KIT Stunting sebanyak 10 set dan KIE KIT sebanyak 25 set.

Penyediaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB

Belanja modal peralatan dan mesin alat kedokteran KB berupa: pengadaan Implant Removal sebanyak 30 set dan IUD KIT sebanyak 39 set.

Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB

Kegiatan penunjang untuk memenuhi sarana kerja PLKB sebanyak 10 jenis.

Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluhan KB

Kegiatan penunjang sebagai sarana prasarana dalam pelayanan KB di masyarakat di Distrik Jair Kampung Naga.

Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB)

Penggandaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit sebanyak 10 set.

Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan Pemasangan Kontasepsi KB.

Kegiatan pelayanan pemasangan kontasepsi KB (MKJP) di Distrik Jair sebanyak 75 orang.

Sosialisasi Model Pelayanan MKJP Kepada Mitra Kerja Jalur swasta dan Pemerintah

Kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan kontrasepsi jangka Panjang di setiap Faskes di jalur swasta dan pemerintah sebanyak 120 orang.

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV AIDS

Kegiatan ini dikhkusukan bagi remaja sebanyak 130 orang di Distrik Firiwage.

Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-PADU

Workshop dan TOT bagi pengelola kelompok BKB Posyandu Padu

Kegiatan Workshop dan TOT yg dilaksanakan di Distrik Jair dan Subur yang diikuti oleh 108 orang.

Program Advokasi dan KIE

Dukungan Media KIE dan Manajeman

Jumlah media KIE yang disediakan sebanyak 5 jenis

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Advokasi dan KIE pada Remaja yg diikuti oleh 150 orang di Distrik Bomakia dan Kouh.

Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas

Pelatihan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih para kader UPPKS untuk dapat meningkatkan perekonomian keluarga kegiatan berlangsung di Distrik Jair sebanyak 65 orang.

Pembinaan Keluarga Kecil yang Berkualitas

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kelompok UPPKS yang berkualitas sebanyak 80 orang di Distrik Jair.

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Biaya Operasional Program Oleh Kader

Kegiatan ini berupa pembiayaan transportasi, makan minum dan honorer bagi Kader KB dan PPKBD di 20 Distrik.

URAIAN :

- Pada Tahun 2018- Tahun 2019 kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja terjadi penurunan jumlah peserta dari 300 orang menjadi 150 orang.
- Pada Tahun 2021 kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja akan terjadi kenaikan jumlah peserta sebanyak 2483 orang.
- Capaian kegiatan kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
- Tahun 2018 - 2021 yaitu : 10,55% terjadi penurunan capaian kegiatan.

CAKUPAN BIDANG KB 2017 -2019

NO	TAHUN	CPR	TFR	UNMET		Peserta KB	Aktif	Aktif (%)	Baru (%)	Percentase	Percentase
				NEED	ASFR						
1	2017	0,62	perempuan usia 15 -49 th	0,01 per	1,1 per	perempuan usia 15 -49 th	6948	1	0,1		
2	2018	0,41		0,2			4724	0,4	0,1		
3	2019	0,45		0,0			5158	0,5	0,1		

CPR : - angka pemakaian kontrasepsi KB pada tahun 2017 terjadi peningkatan.

- angka pemakaian kontrasepsi KB pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0.41 % dari capaian tahun 2017 sebesar 0.62%
- angka pemakaian kontrasepsi KB pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali sebesar 0.45 dari capaian tahun 2018 sebesar 0.45 %

TFR : - angka kelahiran total (TFR) pada tahun 2017 sebesar 0.01 kelahiran hidup per perempuan usia 15 - 49 tahun

UNMET NEED: - angka umeet need pada tahun 2017 sebesar 0%

- angka unmeet need pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0.2 %
- angka unmet need pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0% dari angka unmet need tahun 2018 sebesar 0.2%

ASFR: - angka kelahiran berdasarkan usia tertentu (ASFR) sebesar 1.1 per perempuan usia 15- 19 th.

Peserta KB Aktif : - capaian peserta KB aktif pada tahun 2017 sebesar 6948

- capaian peserta KB aktif pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 4724 dari capaian tahun 2017 sebesar 6948
- capaian peserta KB aktif pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali sebesar 5158 dari capaian tahun 2018 sebesar 4724

persentase KB aktif: - persentase KB aktif tahun 2017 sebesar 1% dari total PUS pada tahun 2017

- persentase KB aktif tahun 2018 terjadi penurunan 0.4% dari capaian tahun 2017 sebesar 1% per PUS
- persentase KB aktif tahun 2019 terjadi penurunan 0.5% dari capaian tahun 2018 sebesar 0.4 % per PUS

peserta KB Baru: - persentase KB Baru pada tahun 2017 - 2019 tidak ada perubahan dengan capaian sebesar 0.1

DATA AKSEPTOR KB TAHUN 2018

NO	PUSKESMAS	PDDK			PIL			SUNTIK			KONDOM			IMPLAN			AKDR			MOW			MOP			PB			WUS	PUS			
		L	P	JML	B	L	Realisas i PA	B	L	Realisa si PA	B	L	Realisa si PA	B	L	Realisa si PA	B	L	Realisa si PA	B	L	Realisa si PA	Target	Realisa si PA	(%)	Target	Realisa si PA	(%)	22 % x Jml PDDK	17 % x Jml PDDK			
1	Tanah Merah	8.507	7.406	15.913	59	182	241	49	157	206	0	0	0	5	20	25	6	0	6	8	0	8	0	0	0	100	127	1,27	2.705	486	0,18	3.501	2.705
2	Mindiptana	2.294	1.996	4.290	11	158	169	32	290	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	43	0,43	729	491	0,67	944	729
3	Woropko	1.130	983	2.113	4	6	10	38	33	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	42	0,42	359	81	0,23	465	359
4	Kouh	828	721	1.549	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0,00	263	-	0,00	341	263
5	Getentiri	11.346	9.878	21.224	109	336	445	530	1.220	1750	13	12	25	141	109	250	0	5	5	1	5	6	0	0	0	100	794	7,94	3.608	2.481	0,69	4.669	3.608
6	Bomakia	1.545	1.345	2.890	20	10	30	20	5	25	0	0	0	25	13	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	65	0,65	491	93	0,19	636	491
7	Arimop	889	774	1.663	2	37	39	1	11	12	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3	0,03	283	64	0,23	366	283
8	Iniyandit	671	584	1.255	0	8	8	4	19	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	4	0,04	213	31	0,15	276	213
9	Kombut	533	463	996	19	33	52	35	75	110	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	56	0,56	169	166	0,98	219	169
10	Ambatkwi	533	464	997	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0,00	169	-	0,00	219	169
11	Firiwage	703	611	1.314	8	25	33	1	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	9	0,09	223	41	0,18	289	223
12	Manggelum	848	737	1.585	0	0	0	10	52	62	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	12	0,12	269	65	0,24	349	269
13	Kawagit	749	652	1.401	6	0	6	16	195	211	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	22	0,22	238	221	0,93	308	238
14	Seisnuk	319	279	598	1	11	12	13	87	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	14	0,14	102	112	1,10	132	102
15	Subur	886	770	1.656	1	187	188	19	36	55	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	21	0,21	282	244	0,87	364	282
16	Fofi	1.454	1.264	2.718	5	0	5	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	10	0,10	462	16	0,03	598	462
17	Ninati	429	373	802	1	4	5	7	27	34	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	8	0,08	136	40	0,29	176	136
18	Ujung Kia	1.195	1.040	2.235	0	1	1	9	66	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	9	0,09	380	76	0,20	492	380
19	Yaniruma	530	461	991	0	2	2	0	13	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1	0,01	168	16	0,09	218	168
20	Kombay	819	711	1.530	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0,00	260	-	0,00	337	260
TOTAL		36.208	31.512	67.720	246	1000	1246	789	2.299	3.088	19	15	34	171	160	331	6	5	11	9	5	14	0	0	0	2.000,00	1.240	0,62	8.807	4.724	0,54	14.898	11.512

DATA AKSEPTOR KB TAHUN 2019

No	Distrik	PDDK			PIL			PA RIL	SUNTIK			PA RIL	KONDOM			PA RIL	IMPLAN			PA RIL	AKDR			PA RIL	MOW			PA RIL	MOP			WUS		PUS	
		L	P	JML	B	L	PA		B	L	PA		B	L	PA		B	L	PA		B	L	PA		B	L	PA		22 % x Jml PDDK	17 % x Jml PDDK					
		8.507	7.406	15.913	182	570	570	868	123	464	464	904	0	0	0	25	32	16	16	49	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	3.501	2.705	
1	Mandobo	2.294	1.996	4.290	19	189	189	243	33	392	392	470	0	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	729		
3	Woropko	1.130	983	2.113	2	4	4	6	12	30	30	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	359			
4	Kouh	828	721	1.549	0	-	-	7	0	-	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	263		
5	Jair	11.346	9.878	21.224	62	271	271	402	151	1.378	1.378	1791	12	25	25	37	115	48	48	163	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4.669	3.608		
6	Bomakia	1.545	1.345	2.890	2	15	15	17	9	6	6	16	0	0	0	0	3	15	15	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636	491		
7	Arimop	889	774	1.663	3	18	18	26	6	17	17	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	283		
8	Iniyandit	671	584	1.255	0	18	18	20	3	29	29	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	213		
9	Kombut	533	463	996	0	32	32	35	9	84	84	100	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	169		
10	Ambatkwi	533	464	997	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	169	
11	Firiwage	703	611	1.314	0	4	4	10	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	223	
12	Manggelum	848	737	1.585	0	-	-	0	4	26	26	45	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	269	
13	Kawagit	749	652	1.401	11	-	-	11	125	133	133	310	0	0	0	0	1	2	2	3	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	308	238	
14	Seisnuk	319	279	598	0	3	3	10	0	15	15	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	102		
15	Subur	886	770	1.656	23	93	93	144	3	75	75	95	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	282		
16	Fofi	1.454	1.264	2.718	10	4	4	9	6	5	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	462	
17	Ninati	429	373	802	0	26	26	26	5	43	43	48	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	136		
18	Kia	1.195	1.040	2.235	5	15	15	20	9	78	78	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	380		
19	Yaniruma	530	461	991	0	-	-	1	0	-	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	168	
20	Kombay	819	711	1.530	0	-	-	10	0	-	-	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	260	
	TOTAL	36.208	31.512	67.720	319	1.262	1.262	1.865	500	2.777	2.777	4.089	16	27	27	68	167	81	81	249	0	2	2	3	7	0	0	7	0	0	0	0	14.898	11.512	

BAB V

PENUTUP

Banyak faktor yang menyebabkan berbagai masalah dan kurang tertariknya masyarakat mensukseskan program Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA) , akar masalah tampaknya terletak pada kenyataan bahwa program BANGGA KENCANA belum berada dalam arus utama pembangunan Nasional , selain itu pula ada tulisan yang viral di masyarakat yaitu “ *Tanah Papua masih luas* ” . akhirnya beberapa program BANGGA KENCANA yang penting untuk diselenggarakan terpaksa di tunda atau dilaksanakan kurang optimal .

Keberhasilan program BANGGA KENCANA di tiap daerah tidak semata - mata di tentukan oleh hasil kerja sektor Kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga saja. Tetapi juga sangat di pengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya maupun secara lintas program sehingga akan didapatkan kontribusi yang lebih valid termasuk informasi data dari setiap lini akan lebih akurat, tidak terjadi perbedaan yang signifikan .

Peningkatan kemajuan program BANGGA KENCANA bisa di nilai dari indikator yang digunakan untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan kesehatan keluarga dan masyarakat yaitu program kependudukan , pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (kesehatan lansia, Bina keluarga balita , dan program lainnya .

Sedangkan pada program pelayanan keluarga berencana walaupun sudah dilakukan promosi dengan berbagai bentuk KIE (komunikasi , informasi dan edukasi) pada masyarakat namun masih saja menjadi program kontroversi di masyarakat kita. Dan masih terus dilakukan terobosan terobosan baru yang bersifat mengajak keluarga dan masyarakat untuk menyukai program BANGGA KENCANA ini.

Sistem informasi BANGGA KENCANA di Kabupaten Boven Digoel sudah mulai dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi program BANGGA KENCANA walaupun belum optimal . hal ini disebabkan arus pengiriman laporan dari tiap mitra

kerja (petugas kesehatan dari tiap puskesmas dan juga PLKB belum maksimal bentuk format standart profil DPPKB dari Provinsi sudah kami terima namun menjadi kendala saat ini adalah internet yang tersedia di Kabupaten pun belum maksimal dipergunakan mengingat pula bentuk data yang kami selalu update marak menggunakan aplikasi-aplikasi yang menitikberatkan pula pada sistem internet . tetapi demikian diharapkan profil DPPKB ini tetap dapat memberikan gambaran secara garis besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh perubahan keadaan pada organisasi perangkat daerah DPPKB dan pula kesehatan masyarakat yg dicapai.

